

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Kawasan Asia Tenggara merupakan kawasan yang sangat penting dan sebagai wilayah yang strategis baik secara geografis maupun secara fungsional. Selain itu negara-negara Asia Tenggara memiliki sumber daya alam yang melimpah. Karena letak geografis yang saling berdekatan itu, kawasan Asia Tenggara menjadi kawasan yang memiliki potensi konflik yang cukup tinggi, hal ini dikarenakan negara-negara didalamnya saling berbatasan langsung.¹

Sebagai negara yang berada di kawasan Asia Tenggara, hubungan Indonesia dan Malaysia dapat dibidang sangat dekat dan harmonis. Faktor utama kedekatan tersebut adalah karena letak geografis yang dekat antara keduanya. Akan tetapi, dengan adanya kedekatan geografis itu justru menjadikan hubungan keduanya rawan terjadi konflik terutama sehubungan dengan wilayah teritorial. Munculnya sengketa kedaulatan antara Indonesia dan Malaysia sebenarnya sudah lama. Dan hingga saat ini sengketa teritorial kedua negara itu masih belum dapat dihindari dan belum mendapat penyelesaian secara tuntas.

Merupakan sebuah paradoks bahwa konflik teritorial di perbatasan menjadi semakin menonjol dan sulit diselesaikan justru setelah Perang Dingin berakhir. Berakhirnya Perang Dingin telah memunculkan konflik-konflik baru

¹ Diklat mata kuliah Politik Pemerintahan Asia Tenggara, Nur Azizah, UMY, 1996. (Tidak

bilateral ke permukaan. Bahkan beberapa diantara konflik itu merupakan sisa-sisa dari Perang Dingin dulu.²

Adanya kedekatan geografis dan karena adanya perbedaan-perbedaan obyektif dalam ukurannya, baik dalam artian luas wilayah daratan maupun perairan, jumlah penduduk dan potensi kekayaan alamnya yang demikian menyolok, justru akan menyebabkan dinamika hubungan diantara keduanya sangat tinggi.³

Hukum Laut Internasional (*UNCLOS* 1982), telah diratifikasi oleh 60 negara peserta termasuk Indonesia dan Malaysia, konsep negara kepulauan telah diakui dalam konvensi tersebut, berarti Indonesia sebagai negara kepulauan dapat menentukan laut teritorial diukur 12 mil dan ZEE 200 mil dari garis pangkal (*straight base line*). Sedangkan Malaysia sebagai negara kontinental diukur dari garis pantai (*coastal line*). Hal ini mengakibatkan penentuan batas wilayah RI-Malaysia semakin kompleks dan rawan terjadi konflik.

Oleh karena itu konflik sengketa teritorial antara Malaysia dan Indonesia tidak berhenti pada kasus Sipadan dan Ligitan saja yang baru berakhir beberapa tahun yang lalu. Diawal tahun 2005 tepatnya pada bulan Februari 2005 kembali muncul permasalahan yang serupa yakni sengketa kepemilikan Blok Ambalat. Setelah jatuhnya Pulau Sipadan dan Ligitan ke tangan Malaysia, kini Blok Ambalat yang letaknya tidak jauh dari kedua pulau tersebut kembali memunculkan konflik di antara kedua negara yang saling bertetangga itu.

² James Luhulima, "Berakhirnya Perang Dingin, Memunculkan Konflik Bilateral di Asia Pasifik", dalam Kompas, 20 Juni 1999.

³ R. Soesilo, "Persepsi Masyarakat Indonesia Terhadap Konflik Laut di Asia Tenggara", CSIS

Kawasan RI-Malaysia di Pulau Kalimantan Timur yang terbentang di darat dan dilaut memang rawan dengan pelanggaran wilayah. Apalagi, pengawasan di kawasan tersebut, baik didarat maupun dilaut masih sangat minim. Luas kawasan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Negara Bagian Sabah dan Serawak, Malaysia, tersebut mencapai 57.731 km² terdiri dari 11 kecamatan dan 319 desa.⁶

Sejak 1967 sudah terbukti bahwa Ambalat merupakan sebuah wilayah yang terdapat prospek minyak dan gas yang dapat dieksploitasi. Lokasi migas itu terbagi dalam dua blok, yakni Blok Ambalat seluas 10.750 km² dan Blok Ambalat Timur 4.739 km².

Masalah status kepemilikan Blok Ambalat yang diklaim Malaysia sebagai wilayahnya tiba-tiba muncul ketika Malaysia yang secara sepihak melalui perusahaan minyaknya Petronas, memberikan hak eksplorasi kepada perusahaan Shell untuk melakukan eksplorasi di wilayah perairan laut di sebelah timur Kalimantan Timur yang mereka beri nama Blok ND6 (Y) dan ND7 (Z). Pemerintah Malaysia memberikan konsesi minyak kepada perusahaan asal Belanda itu pada tanggal 16 Februari 2005 di Kuala Lumpur.⁷

Indonesia yang telah lebih dulu mengklaim wilayah itu sebagai kedaulatannya tentu saja protes atas kebijakan Malaysia tersebut karena di blok yang dinamai Indonesia sebagai blok Ambalat dan Ambalat Timur tersebut, Indonesia sudah terlebih dulu melakukan eksplorasi minyak bumi dan gas

⁶ Kompas, "Ketika Kawasan Perbatasan Terabaikan", 12 Maret 2005

⁷ Kompas, "Indonesia Protes Kontrak Malaysia dengan Shell", 26 Februari 2005

(migas). Dan selama itu pula Malaysia tidak pernah meributkannya sebagai cerminan dari pengakuan Malaysia bahwa wilayah itu adalah wilayah Indonesia.

Dengan munculnya sikap Malaysia yang secara sepihak melakukan eksplorasi sebagai tindakan atas pengklaimannya terhadap kawasan Ambalat, dan protes yang dilakukan Indonesia karena turut mengklaim wilayah tersebut menjadi awal mencuatnya konflik antara Indonesia dan Malaysia tentang masalah perbatasan. Muncul berbagai perdebatan antara kedua Negara karena saling mengklaim bahwa Pulau tersebut adalah miliknya.

Sejak beralihnya kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan, pihak pemerintah Malaysia menempatkan dirinya sebagai Negara kepulauan, yang kemudian menggunakan garis pangkal lurus kepulauan (*straight archipelagic baseline*) dalam penentuan batas wilayahnya sehingga wilayah perairannya menjorok jauh ke selatan.

Malaysia mengklaim bahwa Blok ND 6 dan ND 7 (Ambalat dan East Ambalat) yang telah diberikan oleh Petronas kepada Shell dan Petronas Carigali untuk kepentingan eksplorasi hidrokarbon, masih berada di dalam batas kontinen Malaysia seperti yang tercakup dalam Peta Wilayah Perairan dan Batas Kontinen Malaysia tahun 1979.⁸

Indonesia telah secara terus menerus mengklaim wilayah tersebut sejak zaman penjajah Belanda. Pandangan Indonesia, secara yuridis Indonesia lebih kuat kedudukannya dibandingkan ketika bersengketa terhadap pulau Sipadan dan Ligitan. Indonesia adalah Negara Kepulauan (*archipelagic state*), yang sedikit

⁸ <http://www.investorindonesia.com>. "Malaysia Telah Berencana PL tentang Kepemilikan

memberi keuntungan bagi Indonesia sehubungan dengan klaimnya atas Ambalat. Sedangkan Malaysia hanya Negara pantai biasa. Perbedaan mendasar negara kepulauan dengan negara pantai biasa adalah dalam penetapan titik dasar untuk penarikan batas perairan teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landasan kontinental. Indonesia sebagai negara kepulauan dibolehkan menarik titik dasar dari ujung pulau terluar hingga 200 mil, sehingga Karang Unarang di timur P. Sebatik masih dalam wilayah yurisdiksi nasional RI. Demikian pula dengan Pulau Sebatik bagian selatan, P. Nunukan, P. Bunyu, Ambalat dan Bukat masih merupakan dalam perairan yurisdiksi nasional RI. Sementara Malaysia hanya 12 mil dari daratan Sabah, bukan dari Sipadan-Ligitan yang baru saja dimenangkan.

Kawasan sekitar Blok East Ambalat, yang saat ini ditawarkan perusahaan minyak Petronas kepada investor karena diklaim Pemerintah Malaysia berada dalam wilayahnya, juga sudah dikelola oleh Indonesia sejak lama. Beberapa blok disekitar blok tersebut sudah dikelola sejak puluhan tahun lalu. Sejumlah perusahaan kontraktor bagi hasil (KPS) telah mengoperasikan wilayah-wilayah migas yang berdekatan dengan blok tersebut sejak 1967.

Secara historis, Pulau Ambalat masuk dalam wilayah Kesultanan Bulungan yang kini menjadi salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur. Setelah Bulungan dipecah menjadi empat kabupaten/kota, sejumlah pulau tersebut masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Nunukan.⁹

Dengan adanya berbagai perbedaan pandangan yang digunakan sebagai dasar-dasar klaim itulah yang menyebabkan konflik Ambalat ini semakin

⁹14. <http://www.kabupatenidn.com/2012/09/ambalat.htm> "Sejarah Historis Ambalat Masuk Kesultanan Bulungan"

berkembang luas. Untuk saling mempertahankan klaim tersebut, kedua Negara saling melakukan pertahanan. Pihak Malaysia tetap melanjutkan pengawasan dan penjagaan ketat di perairan Ambalat yang terdapat ladang minyak yang mereka anggap milik perusahaan mereka Petronas. Pengawasan tersebut dilakukan Malaysia dengan mengirimkan armada kapal perangnya untuk berpatroli di sekitar perairan tersebut. Dan Indonesia melalui TNI AL telah menyiagakan tujuh kapal perang berbagai kelas di perairan Tanjung Unarang hingga Blok Ambalat dan Bukat di Laut Sulawesi.

Dari hari ke hari, situasi perairan perbatasan Indonesia di Kaltim dengan Malaysia semakin panas. Indonesia menilai bahwa Malaysia telah melakukan pelanggaran batas Negara dengan membiarkan kapal patroli ataupun kapal lainnya melintasi perairan Indonesia. Dan ketegangan diperbatasan semakin meningkat¹⁰ menyusul terjadinya perang mulut melalui alat komunikasi antara awak kapal TNI AL KRI Rencong yang tengah berpatroli mengawal kapal tunda dan ponton kontraktor pelaksana pembangunan mercusuar dengan kapal Tentara Laut Diraja Malaysia, KD Kerambit-43 yang tengah melintas di atasnya. Adu mulut ini terjadi di 9,5 mil laut di sekitar Karang Unarang.

Dalam kontak mulut tersebut keduanya melakukan saling tuduh bahwa telah melanggar wilayah lautnya masing-masing. Yang pada akhirnya pihak Malaysia menawarkan solusi melalui radio bahwa kedudukan *win-win* alias 50-50. Malaysia menawarkan kepada KRI Rencong untuk berpatroli bersama dengan satu syarat bahwa pembangunan mercusuar sementara dihentikan. Namun

¹⁰ <http://www.kompas.com> (diakses 10 Desember 2011). "Malaysia dan Indonesia Berpatroli Bersama di Laut Sulawesi"